



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **54818**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	925.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/160 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000		
2. Tanah Seluas 109 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/69 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
4. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
6. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	232.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 5 TL MIO AL 115S Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOBIL, HONDA CR-V RM 1,2 WD 2,0 AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	36.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.032.401



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.243.032.401
III. HUTANG	Rp.	126.245.370
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.116.787.031

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.